

TJOKROAMINOTO: PERPADUAN PENDIDIKAN BARAT DAN NILAI-NILAI ISLAM

Septian Teguh Wijiyanto

Departemen Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta

e-mail: septianteguhw@uny.ac.id

Abstrak- Pada masa pergerakan nasional baik tokoh maupun organisasinya tidak hanya fokus terhadap usaha mencapai kemerdekaan, melainkan pendidikan juga diperhatikan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda terdapat banyak permasalahan pendidikan antara lain; terjadi diskriminasi dalam penyediaan pendidikan, jumlah sekolah yang terbatas, dan sistem pendidikan yang tidak berpihak pada kaum pribumi. Artikel ini akan berfokus pada jejaring dan akar gagasan pendidikan yang dilatar belakangi oleh kebutuhan rakyat Indonesia terpelajar dalam usaha mencapai kemerdekaan, terwujudnya akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pendidikan Indonesia yang lebih beragama dan modern oleh HOS Tjokroaminoto. Tjokro merumuskan gagasan pendidikannya dalam tulisan berjudul *Moeslim Nationale Onderwijs*, atau dapat diartikan sebagai pengajaran nasional Islam. Gagasan pendidikan Tjokro menjelaskan bahwa asas-asas dalam Islam merupakan asas yang selaras dengan demokrasi dan sosialisme. Tjokro menawarkan konsep pendidikan modern dengan nilai-nilai yang berkembang di Barat dengan landasan nilai Islam. Dalam gagasan pendidikannya ini Tjokro menjelaskan bahwa nilai-nilai demokrasi, nasionalisme, sosialisme yang berkembang di Barat tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. *Moeslim Nationale Onderwijs* memicu lahirnya sekolah-sekolah modern Islam baik sekolah dalam ruang lingkup organisasi yang Tjokro masuk di dalamnya, maupun organisasi-organisasi Islam lain yang memiliki lembaga sekolah. Gagasan Tjokro ini juga mendorong lahirnya sekolah-sekolah dengan asas agama yang modern, bahkan sampai hari ini gagasan pendidikan Tjokro populer dalam kalangan pendidikan Islam.

Kata kunci: Pendidikan, Islam, Tjokroaminoto.

TJOKROAMINOTO: THE COMBINATION OF WESTERN EDUCATION AND ISLAMIC VALUES

Septian Teguh Wijiyanto

Departemen Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta

e-mail: septianteguhw@uny.ac.id

Abstract- During the national movement, both the figures and their organizations did not only focus on efforts to achieve independence, but also on education. During the reign of the Dutch East Indies there were many educational problems, including; there is discrimination in the provision of education, the number of schools is limited, and the education system is not in favor of the indigenous people. This article will focus on networking and the roots of educational ideas that are motivated by the needs of the educated Indonesian people in an effort to achieve independence, the realization of access to education for all Indonesians, and a more religious and modern Indonesian education by HOS Tjokroaminoto. Tjokro formulated his educational ideas in an article entitled *Moeslim Nationale Onderwijs*, or it can be interpreted as Islamic national teaching. Tjokro's educational idea explains that the principles in Islam are principles that are in harmony with democracy and socialism. Tjokro offers a modern education concept with values developed in the West based on Islamic values. In his educational idea, Tjokro explained that the values of democracy, nationalism, and socialism that developed in the West did not conflict with the values of Islam. *Moeslim Nationale Onderwijs* sparked the birth of modern Islamic schools, both schools within the scope of the organization that Tjokro was involved in, as well as other Islamic organizations that had school institutions. Tjokro's idea also encouraged the birth of schools with modern religious principles, even today the idea of Tjokro's education is popular in Islamic education circles.

Keywords: Education, Islam, Tjokroaminoto.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter dan peradaban suatu bangsa. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, sistem pendidikan yang diterapkan bersifat diskriminatif, hanya dapat diakses oleh kelompok elite tertentu serta mengabaikan nilai-nilai agama, khususnya Islam. Keadaan ini menciptakan kesenjangan intelektual dan spiritual di tengah masyarakat bumiputra. Di tengah kondisi inilah muncul pemikiran progresif dari Haji Oemar Said (H.O.S) Tjokroaminoto yang menawarkan alternatif sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual. Pemikirannya merupakan bentuk kritik terhadap kolonialisme sekaligus upaya membentuk manusia Indonesia yang merdeka secara lahir dan batin.

Sebagai tokoh pergerakan nasional, Tjokroaminoto tidak hanya aktif dalam dunia politik, tetapi juga sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Ia merumuskan konsep *Moeslim Nationale Onderwijs*, yaitu sistem pendidikan nasional yang berbasis nilai-nilai Islam. Konsep ini menekankan pentingnya pendidikan karakter melalui internalisasi nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keikhlasan, keberanian, dan nasionalisme (Amelz, 1952: 143-145). Menurut Tjokroaminoto, pendidikan adalah proses pembentukan manusia seutuhnya, bukan hanya transmisi pengetahuan. Hal ini relevan dengan tujuan pendidikan masa kini yang menekankan pentingnya integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual dalam pengembangan peserta didik.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika melihat realitas pendidikan nasional saat ini yang menghadapi berbagai tantangan, seperti degradasi moral, komersialisasi pendidikan, serta minimnya penguatan karakter dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, pemikiran Tjokroaminoto menjadi sangat relevan untuk dikaji dan dikontekstualisasikan. Pendidikan berbasis nilai Islam yang menyatu dengan semangat nasionalisme dan demokrasi sebagaimana digagas oleh Tjokroaminoto menawarkan alternatif solusi yang bersifat transformatif dan aplikatif. Pendekatan ini juga menjawab kebutuhan pendidikan karakter yang akhir-akhir ini banyak disuarakan oleh para pendidik, pemerhati, dan pembuat kebijakan pendidikan.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Tjokroaminoto dalam bidang pendidikan, khususnya *Moeslim Nationale Onderwijs*, dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan sistem pendidikan nasional yang holistik dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali, memahami, dan menganalisis konsep pendidikan menurut Tjokroaminoto serta menelusuri implikasi dan relevansinya terhadap pendidikan di era kontemporer. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan dapat ditemukan model pendidikan alternatif yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, dan kecerdasan intelektual.

Penelitian ini memiliki kegunaan teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang filsafat dan pemikiran pendidikan Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter di sekolah-sekolah, terutama yang berbasis Islam. Selain itu, penelitian ini juga memberikan inspirasi bagi para pendidik dan pembuat kebijakan dalam merancang sistem pendidikan yang mengedepankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, nilai moral, dan kecintaan terhadap bangsa. Dengan demikian, konsep pendidikan Tjokroaminoto tidak hanya menjadi artefak sejarah, tetapi juga dapat dihidupkan kembali dalam konteks pendidikan modern.

Definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada *Moeslim Nationale Onderwijs* sebagai sistem dan gagasan pendidikan yang dicetuskan oleh H.O.S. Tjokroaminoto, yang menekankan pada integrasi nilai-nilai Islam, nasionalisme, dan kemerdekaan dalam proses pendidikan. Pendidikan dalam konteks ini tidak terbatas pada ruang kelas formal, melainkan mencakup ruang-ruang nonformal seperti diskusi, keteladanan, dan interaksi sosial. Karakteristik pendidikan menurut Tjokroaminoto antara lain: bersifat egaliter, transformatif, dan berorientasi pada pembentukan manusia merdeka yang bertanggung jawab terhadap diri, agama, dan bangsanya (Mawani, 2017: 89-90). Oleh karena itu, menelusuri dan menghidupkan kembali pemikiran pendidikan Tjokroaminoto menjadi upaya strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berakar kuat pada jati diri bangsa Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagaimana dijelaskan oleh Kuntowijoyo, yang terdiri dari lima tahapan: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Topik yang dipilih adalah pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dalam bidang pendidikan, khususnya konsep *Moeslim Nationale Onderwijs*. Pemilihan topik ini didasarkan pada relevansi historis dan kontribusi Tjokroaminoto terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Kuntowijoyo, pemilihan topik yang tepat sangat penting untuk menghasilkan penelitian sejarah yang bermakna (Kuntowijoyo, 2003: 89).

Tahap heuristik melibatkan pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pemikiran pendidikan Tjokroaminoto. Sumber primer meliputi karya-karya asli Tjokroaminoto, seperti arsip dan dokumen terkait. Sumber sekunder mencakup buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa. Kuntowijoyo menekankan pentingnya keakuratan dan kelengkapan dalam pengumpulan sumber untuk mendukung validitas penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 2003: 95).

Verifikasi dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan kritik eksternal dan internal terhadap sumber, seperti menilai otentisitas dokumen dan konsistensi isi. Kuntowijoyo menyatakan bahwa verifikasi adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian sejarah dapat dipercaya (Kuntowijoyo, 2003: 102).

Interpretasi merupakan tahap di mana peneliti memberikan makna dan analisis terhadap data yang telah diverifikasi. Dalam konteks ini, pendekatan politik digunakan untuk memahami bagaimana pemikiran pendidikan Tjokroaminoto dipengaruhi oleh dan mempengaruhi dinamika politik pada masa itu. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa pendekatan politik dalam sejarah membantu mengungkap hubungan antara ide dan kekuasaan dalam konteks historis (Kuntowijoyo, 2003: 110).

Tahap akhir adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah berdasarkan hasil interpretasi. Penulisan ini bertujuan untuk menyajikan narasi yang koheren dan informatif mengenai pemikiran pendidikan Tjokroaminoto. Kuntowijoyo menekankan bahwa historiografi harus mampu menyampaikan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa masa lalu kepada pembaca (Kuntowijoyo, 2003: 120).

Hasil dan Pembahasan

A. Pendidikan pada masa Hindia Belanda

Pendidikan tidak mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Hindia Belanda setelah mengambil alih kekuasaan dari tangan VOC. Permasalahan ini jelas terasa karena pendidikan diawal kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda belum menyentuh masyarakat secara umum (Djumhur, 1959: 120-121). Hal ini didukung oleh kutipan sebagai berikut:

*Het onderwijs aan de Indlandsche bevolking van Java is eerst na 1850, onder leiding en met steun der Regeering, in goede banen geleid. Voor dien, in het bijzonder ten tijde van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, werd op Java niet gedacht aan een zich intensief bemoeien met het eigenlijk bestuur of de huishouding der Indlandsche bevolking.*¹

Pemerintah Hindia Belanda diawal kekuasaan tidak memperhatikan pendidikan secara serius, mereka lebih banyak fokus pada usaha mempertahankan kekuasaan dan eksploitasi yang

¹ Pendidikan bagi pribumi yang diberikan untuk penduduk Jawa baru diadakan setelah tahun 1850, di bawah bimbingan dan dukungan dari Pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan. Sebelumnya, terutama pada saat VOC tidak ada keinginan untuk memberikan pendidikan bagi penduduk Jawa karena setiap daerah memikirkan penduduknya dengan tradisi yang ada. Lihat dalam A. C. Deenik, "In Vogelvlucht". Dalam A. C. Deenik, G. H. H. Zandvoort, R. Sadikin (Ed), *Gedenkboek: MOSVIA 1879-1929*. (Bandoeng: N.V. Mij Vorkink, 1929), hlm. 5.

menguntungkan dibidang ekonomi. Pendidikan bagi pribumi dirasa tidak perlu diberikan karena tidak memberikan keuntungan terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Pendidikan yang ada hanya untuk anak-anak keturunan Belanda dan anak-anak Hindia Belanda yang beragama Nasrani (Djumhur, 1959: 118-122). Pemerintah Hindia Belanda menciptakan sekat dalam masyarakat Hindia Belanda dengan membuat kebijakan untuk golongan tertentu. Pendidikan di Hindia Belanda tidak luput dari kebijakan yang hanya diberikan pada salah satu golongan. Permasalahan pendidikan terjadi akibat faktor fokus pemerintahan dan kebijakan yang menguntungkan golongan tertentu, namun permasalahan pendidikan juga disebabkan karena faktor finansial. Pemerintah Hindia Belanda tidak mengalokasikan dana untuk menyelenggarakan pendidikan. Keuangan Pemerintah Hindia Belanda banyak terkuras untuk dana perang.

Pemerintah Hindia Belanda mengalami kerugian besar akibat dana yang dikeluarkan untuk Perang Jawa (1825-1830) dan peperangan antara Belanda dan Belgia (1830-1839). Perang yang dialami Pemerintah Hindia Belanda dalam waktu yang bersamaan membuat kondisi keuangan pemerintah sangat kacau (Nasution, 2001: 12). Kondisi keuangan yang terjadi mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda mencari jalan untuk menanggulangi keadaan keuangan. Pemerintah Hindia Belanda melakukan usaha untuk memperbaiki keadaan keuangan, dengan mengambil langkah politik.

Raja Belanda meninggalkan prinsip-prinsip liberal setelah mengalami kondisi yang kacau akibat perang. Van den Bosch menganjurkan rencana-rencana kepada Raja Belanda. "Rencana-rencana sebagai usaha untuk memperbaiki kondisi keuangan Pemerintah Hindia Belanda." Van den Bosch memiliki anggapan bahwa rencananya akan berhasil dilaksanakan di Hindia Belanda, dengan memanfaatkan rakyat Hindia Belanda. Rencana van den Bosch yang diterima oleh Raja Belanda ini dinamakan *Cultuurstelsel* atau Tanam Paksa (Nasution, 2001: 12). Hasil dari tanam paksa diharapkan mampu memberikan keuntungan besar di pasar Eropa apalagi dengan biaya produksi yang rendah di Hindia Belanda.

Sistem Tanam Paksa yang dilaksanakan di Hindia Belanda mengakibatkan kebutuhan pegawai pribumi rendah yang murah untuk menjaga perkebunan pemerintah agar berjalan lancar. Pegawai rendahan yang berasal dari pribumi ini dipilih dari anak-anak kaum *ningrat* yang telah mempunyai kekuasaan tradisional sehingga menjamin keberhasilan sistem ini. Kondisi demikian mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda memberikan pendidikan bagi calon pegawai rendahan.

Tahun 1848 Pemerintah Hindia Belanda masih mengalami kekurangan pegawai khususnya pada bagian administrasi. Kondisi demikian mengakibatkan Gubernur Jenderal diberi kekuasaan mempergunakan uang dari anggaran belanja negara sejumlah f. 25.000 untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi pribumi di Pulau Jawa (Djumhur, 1959: 122).

*Eerst in 1848 werd op de Indische begrooting een som uitgetrokken van f. 25000.-per jaar voor de oprichting van scholen. Die zouden dan voornamelijk bestemd zijn om jongelieden op te leiden, die later als Inlandsch-Ambtenaar plaatsing zouden vinden.*²

Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sekolah digunakan untuk mencetak calon-calon pegawai. Calon-calon pegawai dipersiapkan untuk memenuhi tenaga kerja murah yang dapat ditempatkan untuk mengawasi Tanam Paksa.

Pemerintah Hindia Belanda mulai memberikan kesempatan pendidikan bagi pribumi dengan berlakunya Tanam Paksa. Pendidikan bagi pribumi ini semata-mata karena kepentingan Pemerintah Belanda agar mendapatkan tenaga kerja yang mumpuni dan digaji rendah. Sekolah bertujuan mempersiapkan pegawai-pegawai untuk bekerja sebagai pengawas tanam paksa dan administrasi pemerintahan.

Pemerintah Hindia Belanda menunjukkan keseriusannya dalam menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi. “Tahun 1867 Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu departemen yang disebut *Departement van Onderwijs en Eeredienst*” (Gunawan, 1986: 19). Pendidikan mendapatkan perhatian serius dengan dibentuknya departemen yang mengurus pendidikan ini. Pendidikan semakin dirasa penting seiring dengan kebutuhan akan pegawai baik oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun swasta akibat diberlakukannya Undang-Undang Agraria.

Undang-undang Agraria membuat Hindia Belanda terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta. Kondisi yang terjadi membuat Hindia Belanda mengalami kemajuan ekonomi (Simbolon, 2006: 153). Kondisi perekonomian di Hindia Belanda mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan swasta yang sedang berkembang. Tenaga kerja yang dibutuhkan memiliki syarat mampu menguasai Bahasa Melayu dan berasal dari pembesar pribumi. Syarat tersebut mutlak karena dengan demikian tenaga kerja yang dibutuhkan berlaku sebagai penyambung antara pemerintah dan pribumi. Kondisi perekonomian yang berkembang pesat berpengaruh pada kebutuhan tenaga kerja, pemenuhan tenaga kerja yang hanya dapat dilakukan dengan mempersiapkan melalui pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi dengan mengeluarkan *Indisch Staatsblad* 1893, no. 25., sebagai berikut:

...pengaturan dasar-dasar baru bagi pendidikan untuk pribumi yang membagi sekolah pribumi menjadi dua bagian. Sekolah Dasar Kelas Satu khusus untuk anak-anak priyayi dan kaum terkemuka dan Sekolah Dasar Kelas Dua bagi anak-anak rakyat jelata.

Politik Etis yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda menjadi sebuah perhatian yang besar terhadap pendidikan. Pendidikan bagi kaum pribumi terbuka untuk semua golongan. Pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian pada pendidikan tentu tidak semata-mata ingin

² Pertama-tama pada tahun 1848 dialokasikan sejumlah anggaran, f. 25000.- per tahun untuk pendirian sekolah. Terutama ditujukan untuk melatih para pemuda yang kemudian akan ditempatkan sebagai pegawai pemerintahan. Lihat dalam A. C. Deenik, *op.cit.*, hlm. 6.

mensejahterakan pribumi melainkan tahun 1900 Pemerintah Hindia Belanda semakin banyak memerlukan tenaga pegawai yang terampil untuk bekerja di Pemerintahan Hindia Belanda.

Kaum pribumi berbondong-bondong memiliki keinginan besar untuk memperoleh pendidikan. Mereka meyakini pendidikan merupakan jalan untuk dapat bekerja pada Pemerintahan Hindia Belanda dan mendapatkan posisi yang menguntungkan. Pendidikan yang diterapkan dalam usaha pelaksanaan Politik Etis memberikan pengaruh terhadap pribumi.

Pendeknya, pelaksanaan program Politik Etis itu telah menimbulkan banyak kesempatan, tetapi sekaligus juga hambatan baru bagi pribumi, sesuatu yang sangat asing dan membingungkan. Betapa tidak! Pribumi hampir tidak dibantu menangkap logika dasar memahami ujung-pangkal keadaan itu. Mereka tinggal menerima proyek-proyek sehingga merasa lebih sebagai sasaran (objek) daripada pelaku (subjek) pembaharuan. Pemerintah jajahan seolah hanya perlu membalas budi terhadap rakyat Hindia-Belanda, bukannya mengajak mereka memahami masalahnya sendiri dan membantu memecahkannya. . . (Simbolon, 2006: 243)

Pendidikan yang diterapkan semakin memberikan pengaruh Belanda dalam masyarakat pribumi. Para pribumi yang menempuh pendidikan di sekolah Pemerintah Hindia Belanda dijadikan sasaran untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Pemerintah Hindia Belanda, apalagi ketika awal diterapkannya Politik Etis jumlah siswa terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah di Hindia Belanda.

Pendidikan Politik Etis yang diterapkan di Hindia Belanda memberikan dampak kepada para siswa yang berasal dari pribumi dan golongan priyayi dalam membuka pengetahuan mereka. “Kondisi masyarakat di Hindia Belanda mengakibatkan para siswa di sekolah Hindia Belanda membuka mata mereka dan melahirkan gerakan-gerakan kearah perbaikan nasib masyarakat Hindia Belanda (Rutgers, 2012: 2-3).”

Munculnya gerakan-gerakan dari kaum intelektual Hindia Belanda tidak hanya disebabkan oleh keadaan di dalam negeri melainkan kondisi di luar negeri. Kondisi di luar negeri ikut memberikan dampak bagi terciptanya perhatian terhadap memperjuangkan nasib masyarakat Hindia Belanda. Kondisi yang terjadi di dunia internasional mendorong semangat kebangsaan yang muncul. “Peristiwa luar negeri itu perlu disebutkan, mengingat pengaruhnya terhadap bangkitnya kebangsaan Indonesia” (Simbolon, 2006: 640). Konsep-konsep nasionalisme Indonesia muncul dengan bangkitnya kebangsaan Indonesia ini.

Nasionalisme merupakan landasan kaum intelektual untuk memikirkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Kesadaran akan nasionalisme yang berasal dari kaum intelektual diprakarsai oleh sekolah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Banyak siswa-siswa yang berasal dari sekolah Belanda terlibat dalam gerakan-gerakan politik di Indonesia bahkan menjadi tokoh yang berpengaruh di dalamnya (Nagazumi, :148). Munculnya Budi Utomo

jelas berkaitan dengan sekolah buatan pemerintah yaitu STOVIA. Kaum nasionalis melahirkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Terjadilah pertentangan yang kian membesar antara pemikiran orang-orang Indonesia progresif dengan politik kolonial. Apabila Belanda menekankan keragaman aristokrasi, etnis dan regional, maka kaum nasionalis cenderung menuju persatuan, sosialisme, dan demokrasi. Modernisasi masyarakat sangat menarik perhatian pejabat-pejabat muda, yang berpendapat bahwa apa yang dinamakan unsur-unsur tradisional melemahkan pangreh praja dari segi profesi dan menggerogoti posisinya dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Betapa pun, bagi pemerintah, justru unsur-unsur inilah yang menjadi pembentuk kekuatan korps itu, sehingga bertekad selalu tetap melindunginya dengan jalan apa pun (Sutherland, :204).

B. Latar Belakang Kehidupan Tjokroaminoto

Oemar Said Tjokroaminoto lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 di Desa Bakur, Madiun, Jawa Timur dan wafat dalam usia 52 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1934. Semasa kecil Tjokroaminoto biasa dipanggil dengan Oemar Said. Kelak lebih dikenal dengan nama Tjokroaminoto (Amelz, 1952: 50). Tjokroaminoto dilahirkan dari keluarga terhormat, ditinjau dari garis keturunannya mengalir darah bangsawan dan ulama. Buyutnya Kyai Bagus Kasan Besari merupakan ulama kharismatik pemilik dan pengasuh pesantren Tegal Sari Ponorogo. Kyai Bagus Kasan Besari merupakan teladan bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Kyai Bagus Kasan Besari menikah dengan putri dari Susuhunan Paku Buwono III, pernikahan ini menjadikan Kyai Bagus Kasan Besari sebagai bagian dari keluarga Keraton Surakarta (Aziz, 2018: 1).

Kakek Tjokroaminoto yang bernama Tjokronegoro menjabat sebagai Bupati Ponorogo, daerah yang pada masa Tjokroaminoto, dikenal sebagai daerah keras yang penuh konflik dan kekerasan. Perkelahian antar warok menjadi peristiwa yang sering terjadi oleh sebab itu Ponorogo harus dipimpin oleh orang yang berani, memiliki kemampuan beladiri, dan memiliki sifat mencintai. Tjokronegoro dianggap mampu menciptakan kesejahteraan, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat, karena itu ia menjadi bangsawan yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat (Melayu, 2002: 40).

Ayah Tjokroaminoto adalah Raden Mas Tjokroamiseno merupakan seorang *pangreh praja* dengan pangkat Wedana di daerah Kleco, Madiun. Tjokroaminoto memiliki dua belas saudara kandung, secara berurutan mereka adalah: Raden Mas Oemar Djaman Tjokrowiro, Raden Mas Oemar Said Tjokroaminoto, Raden Ayu Tjokrodisoerjo, Raden Mas Poerwadi Tjokrosoeprodjo, Raden Mas Oemar Sabib Tjokrosoeprodjo, Raden Ajeng Adiati, Raden Ayu Mamowinoto, Raden Mas Abikoesno Tjokrosoejoso, Raden Ajeng Istingatin, Raden Mas Poewoto, Raden Adjeng Istidja Tjokrosoedarmo, dan Raden Ayu Istirah Mohammad Soebari (Amelz, 1952: 48-50). Diantara mereka yang mengikuti jejak Tjokroaminoto dalam pergerakan nasional adalah Oemar Sabib dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Sedangkan saudaranya yang lain mengikuti jejak ayahnya menjadi Bupati, pegawai tinggi, dan sejenisnya (Santosa, 2009: 55).

Tjokroaminoto lahir dan dibesarkan dalam keluarga bangsawan, karena itulah ia berhak menyandang gelar *Raden Mas*. Tjokroaminoto kecil hidup dan bergaul dengan masyarakat. Dalam kesehariannya, gelar kebangsawannya sering ditanggalkan agar dapat memiliki hubungan akrab dengan anak-anak sepermainannya. Kedudukan Tjokroaminoto sebagai anak Wedana tentunya menjadi batasan tersendiri dalam pergaulan, karena teman-temannya berasal dari rakyat biasa yang tetap hormat kepadanya.

Tahun 1902 Tjokroaminoto dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang anak priyayi, anak dari Raden Mas Magoensoemo wakil Bupati Ponorogo yaitu Raden Ayu Soeharsikin. Dari pernikahannya lahirlah lima orang anak yaitu Siti Oetari (kelak menjadi istri Soekarno), Oetarjo alias Anwar, Harsono alias Moestafa Kamil, Siti Islamijah dan Soejar Ahmad (Mulawarman, 2015: 16). Di Semarang Tjokroaminoto bekerja serabutan, berinteraksi dengan realitas rakyat jelata, bahkan menjadi kuli pelabuhan pun dilakoninya. Pengalaman tersebut membuat dirinya memahami bagaimana kehidupan rakyat kecil, buruh, pekerja kelas bawah di perkebunan kereta api, pengadilan, pelabuhan, dan sebagainya yang jauh dari kenyamanan hidup sebagaimana pernah dirasakannya semasa kecil sampai remaja, lazimnya anak dari keluarga priyayi (Mulawarman, 2015: 18).

Kesetiaan, dukungan moral, dan keteguhan hati Soeharsikin mendukung penuh keinginan suaminya memperjuangkan rakyat. Tahun 1905 Tjokroaminoto diangkat menjadi juru tulis di kantor Kabupaten Ngawi, bahkan sempat berhasil menduduki posisi patih, akan tetapi bekerja sebagai pegawai pemerintahan ternyata membosankan bagi baginya. Selama menjadi juru tulis di kantor Kabupaten Ngawi, yang selalu dipikirkannya bukanlah pengabdian pada tuan Bupati dan para opsir Belanda yang menjadi atasannya (Sutidja, 2007: 6). Ia memikirkan nasib rakyat kecil bangsanya yang tak henti-hentinya ditindas kesewenang-wenangan pemerintah Hindia Belanda. Anhar Gonggong (1986: 15) mengungkapkan Tjokroaminoto menanggalkan identitas *kepriyayiannya*;

Tjokroaminoto tidak menggunakan kesempatan-kesempatan yang terbuka baginya untuk mendapatkan kesenangan hidup. Pantang baginya untuk membongceng menikmati hidup kekuasaan orang tua dan mertuanya. Tabu baginya untuk *membeo* kepada kehendak orang lain, juga kepada orang tuanya sekalipun. Dia adalah ningrat yang tidak senang kepada cara hidup ningrat, demikian pula terhadap gelar-gelarnya. Cara berpikirnya telah melampaui kehendak zamannya ketika itu.

Tahun 1907, Tjokroaminoto keluar dari pekerjaannya dan pergi ke Surabaya, bekerja di perusahaan dagang bernama *kooy dan co*, sebuah perusahaan gula. Tjokroaminoto juga aktif menulis di harian *Bintang Surabaya* dan harian *Fadjar* (Santosa, 2009: 55). Pemikiran dalam tulisannya berkembang seiring dengan pengetahuan yang dimilikinya, didorong dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat saat itu yang lebih mengarah pada soal-soal masyarakat dan kerakyatan. Tampak ingin membongkar kerusakan-kerusakan di masyarakat kemudian

memperbaikinya. Tjokroaminoto merasa bahwa ia sama dengan rakyat lainnya walaupun ia lahir dari keluarga bangsawan namun kebangsawanan yang disandangnya tidak perlu dipakai. Tjokroaminoto menganggap bahwa ketika manusia lahir semuanya sama, seharusnya tidak ada sekat-sekat yang membatasi dalam masyarakat.

Selama Tjokroaminoto aktif menekuni dunia jurnalistik, tulisannya selalu dimuat dalam berbagai media cetak, tulisannya terkenal tajam. Dunia jurnalistik yang membuatnya meninggalkan tugasnya dari pegawai pemerintahan Hindia Belanda, semangat kebangsaannya mulai tumbuh. Tjokroaminoto kemudian mewujudkan semangatnya dengan masuk ke politik dan mulai mengorganisasikan para pemuda bumiputra untuk lebih aktif meningkatkan kesadaran dan kemampuan di segala bidang.

Tahun 1897 Tjokroaminoto berhasil menyelesaikan pendidikannya pada Sekolah Belanda tingkat dasar, sehingga ia dinilai mahir dalam bidang baca, tulis, berhitung, dan menguasai Bahasa Belanda. Raden Mas Tirtomisenno kemudian memasukkan Tjokroaminoto ke sekolah calon pegawai pemerintah bumi putera atau yang dikenal dengan OSVIA (*Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren*) yang berada di Magelang, Jawa Tengah (Marihandono, dkk. 2015: 77).

Tjokroaminoto setuju untuk sekolah di OSVIA, karena tradisi di kalangan pegawai pemerintah atau *Binnenland Bestuur* (BB) biasa memasukkan anak-anaknya ke OSVIA (Marihandono, dkk. 2015: 77). Orang tua dari golongan bangsawan atau priyayi memiliki harapan kepada anaknya setelah mengikuti pendidikan di OSVIA, anaknya dapat menjadi pegawai pemerintah, sehingga kesejahteraan hidup keluarganya akan terjamin.

Selama menjadi pelajar OSVIA, Tjokroaminoto selalu menjadi pemimpin yang disegani oleh teman-temannya, karena meskipun dia mendapatkan cap nakal akan tetapi ia tetap memiliki kecerdasan di atas teman-temannya (Gonggong, 1985: 9). Jabatan orang tuanya cukup tinggi dan terpandang juga menjadi faktor Tjokroaminoto disegani dan dihormati selama bersekolah di OSVIA. Masyarakat pada masa itu akan menghormati pejabat dan keluarganya, termasuk juga orang-orang yang tinggal dalam rumah pejabat.

Keinginan menjadi pegawai pemerintah merupakan keinginan masyarakat pada umumnya, karena jabatan tersebut mengantarkan pemilik dan keluarganya untuk masuk ke dalam lapisan masyarakat yang dihormati yaitu lapisan priyayi. Kedudukan sebagai priyayi menjadikan seseorang menjadi terhormat di mata pemerintah maupun masyarakat, yang berarti dimilikinya beragam fasilitas-fasilitas yang akan memudahkan dalam menjalani kehidupan.

Pendidikan di OSVIA berlangsung selama lima tahun dengan penekanan pada pelajaran ilmu pemerintahan, karena OSVIA merupakan sekolah untuk mendidik anak-anak pribumi agar terampil menjadi pegawai pemerintah. Masa depan pelajar OSVIA sangat baik, karena setelah lulus dari sekolah, pekerjaan sudah menanti. Pemerintah secara resmi akan mengangkat mereka menjadi

pegawai pemerintah di daerah-daerah yang membutuhkannya. Biasanya mereka akan ditugaskan di daerah sekitar tempat asalnya.

Masyarakat memiliki minat besar untuk menyekolahkan anaknya ke OSVIA, tetapi untuk masuk ke dalamnya sangatlah sulit. OSVIA menjadi sekolah khusus yang bersifat tertutup, tidak semua anak pribumi yang cerdas dapat diterima sebagai siswa di OSVIA (Marihandono, dkk. 2015: 77). Anak-anak dari golongan masyarakat biasa kurang mendapatkan kesempatan untuk masuk sebagai siswa di OSVIA, sekolah hanya membuka kesempatan untuk anak-anak yang orang tuanya menjadi pegawai pemerintah.

Pendidikan di OSVIA mempersiapkan para siswanya untuk benar-benar paham administrasi Hindia Belanda dan sebagai generasi yang disiapkan untuk melanjutkan orang tuanya. OSVIA melahirkan lulusan-lulusan yang kelak menjadi tulang punggung pangreh praja dan dipandang sebagai bentuk kepagawaian sipil modern di masa depan. Siswa-siswa OSVIA benar-benar menjadi harapan dalam melanjutkan pemerintahan baik oleh para orang tua maupun oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan siswa-siswa OSVIA dengan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan administrasi Pemerintahan Belanda (Wijiyanto, 2019: 105-106).

Tahun 1902 Tjokroaminoto dinyatakan lulus dari OSVIA Magelang. Berdasarkan surat keputusan pemerintah, Tjokroaminoto ditugaskan menjadi juru tulis patih di Ngawi, Jawa Timur. Akan tetapi tidak berlangsung lama Tjokroaminoto keluar dari pekerjaannya dan pergi ke Surabaya (Achdian, 2017: 32-34). Di Surabaya Tjokroaminoto melanjutkan sekolah di BAS (*Burgelijke Avond School*) yaitu sekolah teknik sipil jurusan mesin (Santosa, 2009: 55). *Burgelijke Avond School* ditempuh selama tiga tahun oleh Tjokroaminoto. Berbekal sertifikat dari *Burgelijke Avond School* Tjokroaminoto keluar dari perusahaan *Kooy & Co* dan melamar sebagai teknisi pada pabrik gula Rogojampi yang berada di Kota Surabaya (Setyarso, 2011: 59).

Riwayat pendidikan Tjokroaminoto dalam menempuh pendidikan akan banyak mempengaruhi pemikiran dan sikapnya dalam masa pergerakan nasional. Pendidikan dengan konsep Pemerintah Hindia Belanda yang dia tempuh menjadi salah satu keresahan Tjokroaminoto yang akhirnya menganggap pendidikan sangat membutuhkan sentuhan agama. Sedangkan, pendidikan Tjokroaminoto di OSVIA yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi *pangreh praja* justru membuatnya tidak menginginkan menjadi pegawai Belanda.

C. Peran Tjokroaminoto dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Tahun 1905 Sarekat Dagang Islam (SDI) berdiri sebuah organisasi yang dipimpin oleh Haji Samanhudi. Organisasi ini merupakan organisasi pergerakan kumpulan para pengusaha batik di

Solo, yang berdiri karena respon perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sangat menganaktirikan penduduk pribumi yang beragama Islam dan menemptakan warga kelas putih yang beragama Kristen sebagai warga kelas satu. Pernyataan Ratu Belanda yang disampaikan dalam pidatonya, “sebagai Negara Kristen, pemerintah Belanda berkewajiban mengatur dengan lebih baik kedudukan hukum rakyat Kristen yang berada di Hindia Belanda” (Mulawarman, 2015: 19). Perlakuan diskriminatif tersebut memberikan semangat bagi Sarekat Dagang Islam untuk memberikan kesadaran politik terhadap pedagang-pedagang muslim.

Mengenai pendirian SDI, banyak pendapat tentang tahun pendiriannya, tetapi H. Samanhudi memberikan keterangannya.

Dengan ikhlas, untuk kemurnian sejarah pergerakan Indonesia, dengan ini saya terangkan bahwa SDI dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 1905, di rumah saya di kampung Sandakan, Solo, dengan delapan orang teman, yaitu: saudara Sumawardoyo, Wiryotirto, Suwandi, Suporanoto, Jarmani, Zhardjosuwarto, Sukir, dan Martodikono (Amin, 1996: 29).

Tujuan berdirinya adalah untuk menggalang kerjasama di antara pedagang-pedagang Islam demi memajukan perdagangan dan menyaingi pedagang-pedagang Cina. Serekat Dagang Islam dikembangkan di Jakarta pada tahun 1909 oleh R. M. Tirtoadisryo kemudian di Bogor pada tahun 1911. M. C. Ricklefs (1992: 252) menjelaskan;

Pada tahun 1911, beliau mendirikan pula organisasi yang sama di Bogor, yang mana kedua organisasi tersebut memiliki satu tujuan yang sama yakni untuk membantu pedagang-pedagang Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan orang-orang Cina.

Djoko Marihandono (2015: 5) menjelaskan SI pada prinsipnya akan menjalankan syariat Islam dengan tidak melanggar undang-undang, adat istiadat, dan tidak melanggar ketertiban umum. Adapun tujuannya adalah: (1) memajukan perdagangan kaum pribumi, (2) menolong anggota-anggotanya yang mendapat kesusahan, (3) memajukan pendidikan, demi meningkatkan kualitas perilaku penduduk pribumi, dan (4) mengedepankan keadilan menurut ajaran agama Islam.

Lahirnya SI memiliki versi yang lebih berwarna lain, Takashi Shiraishi (Setyarso, 2011: 20-21) menyatakan SI tumbuh dari perkumpulan ronda *Rekso Rumecko*. Haji Samanhudi bersama saudara, teman, dan pengikutnya mendirikan perkumpulan ini. *Rekso Rumecko* bersaing dengan perkumpulan serupa milik Cina, yaitu *Kong Sing*. Dalam perkembangannya Pemerintah Hindia Belanda menerapkan peraturan dimana setiap perkumpulan tanpa status hukum akan dibubarkan. *Rekso Rumecko* pun berbenah, Haji Samanhudi mengubahnya menjadi Sarekat Dagang Islam.

Akan tetapi, karena memiliki kendala dalam penyusunan anggaran dasar Haji Samanhudi meminta bantuan kepada Tirtoadisurjo pemilik surat kabar *Medan Prijaji*. Tirto, yang saat itu ada Batavia dan Bogor aktif dalam Sarekat Dagang Islamijah (SDI), sepakat untuk membantu. Menurut

Takashi (Setyarso, 2011: 21) Tirto menyusun anggaran dasar dan mengumumkan pembentukan cabang Sarekat Dagang Islamijah Bogor di Surakarta dalam surat kabar *Medan Prijaji*. *Rekso Rumecko* ditata kembali secara modern oleh Tirto dan diberi nama baru: Sarekat Dagang Islam. Anggaran dasar dirumuskan dan ditandatangani oleh Tirtoadisurjo pada 9 November 1911.

Kendati dari nama memiliki kemiripan, asal-usul dan tujuan kedua organisasi tersebut amat berbeda. Sarekat Dagang Islam mengacu pada perkumpulan ronda *Rekso Rumecko* dan menjadi benteng pelindung saudagar batik Solo dari tekanan pedagang Cina dan kaum ningrat. Sarekat Dagang Islamijah Bogor didirikan oleh Tirtoadisurjo tahun 1909 di Batavia. Tujuannya adalah memajukan dan melindungi kepentingan niaga pedagang muslim bumiputra. Takashi menyatakan perbedaan ini dengan tegas: “Sarekat Islam bukan berasal dari perkumpulan Sarekat Dagang Islamijah Bogor”.

Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirtoadisuryo menjalin kerja sama dalam persuratkabaran, kerja sama ini tidak berlangsung lama karena terjadi pertikaian, yang menyebabkan aktifitas SDI menurun. Pertikaian ini terjadi akibat penyalahgunaan dana dan ketidaksesuaian harga surat kabar yang terlalu mahal dari persetujuan semula. Pertikaian antara Raden Mas Tirtoadisuryo dengan Haji Samanhudi menyebabkan hubungan mereka mulai renggang, sehingga mempengaruhi keberadaan organisasi yang akhirnya hubungan tersebut benar-benar pecah (Niel, 1984: 127).

Haji Samanhudi meminta agar Tjokroaminoto bertindak sebagai penyusun organisasi kelompok dagangnya, agar organisasinya dapat disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda (Yasmis, 2009: 25). Haji Samanhudi meminta agar Tjokroaminoto membantunya, Tjokroaminoto pun setuju. Tjokroaminoto membuatkan akta hukum organisasi baru yang dinamakan Sarekat Islam. Akta hukum tersebut dibuat atas namanya sendiri pada tanggal 10 September 1912. Dengan demikian SI secara resmi telah dibentuk, SI merupakan salah satu organisasi yang gemilang di Hindia pada awal kebangkitan nasional. Perubahan nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dimaksud agar supaya keanggotaan perkumpulan tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, tetapi diperluas mencakup seluruh kegiatan masyarakat. Pembentukan Sarekat Islam dapat diketahui melalui pengakuan pemerintah Hindia Belanda yang mengatakan bahwa:

Sarekat Islam sebagai organisasi berbadan hukum setelah H. O. S. Tjokroaminoto menghadap notaris B. Tert Kuile di Solo dan ditetapkan pada tanggal 10 November 1912, berdasarkan anggaran dasar Sarekat Islam yang baru, meskipun demikian sebenarnya pengakuan pemerintah Belanda terhadap organisasi tersebut telah berjalan tanggal 14 September 1912 (Yasmis, 2009: 26).

Pengakuan inilah yang memberikan peluang pada Sarekat Islam untuk mulai mengembangkan sayapnya bergerak tidak hanya dalam bidang perekonomian, tetapi juga bergerak

di bidang politik dan sosial budaya yang didasari oleh ajaran Islam. Kegiatan organisasi ini selalu berorientasi untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama.

Di Surabaya, Tjokroaminoto menyambut Sarekat Dagang Islam (SDI) dan bergabung pada bulan Mei 1912 atas ajakan Haji Samanhudi untuk memperkuat organisasi tersebut (Noer, 1982: 118). Tjokroaminoto tampil menjadi pimpinan muda yang sangat berbakat. Ia menjadi ketua Cabang Sarekat Dagang Islam Jawa Timur. Noer (1982: 121-122) menjelaskan Tjokroaminoto cukup dikenal dengan sikapnya yang radikal dan kritis menentang diskriminatif terhadap rakyat banyak. Ia dikenal sebagai seorang yang menganggap dirinya sama derajatnya dengan pihak manapun, baik orang Belanda maupun pejabat pemerintah.

Tahun 1912-1913, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam dalam waktu singkat, SI berkembang menjadi gerakan dengan cakupan nasional berkat dukungan kelas terpelajar dan kepemimpinan tradisional Islam (Kuntowijoyo, 2008: 249). Sebuah gerakan baru yang mampu menghimpun seluruh lapisan masyarakat dan mempersatukan umat dalam perlawanan awal dari gerakan kemerdekaan, seperti yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo bahwa:

Pada awal abad ke XX, di tengah-tengah kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk pribumi, kaum santri berhasil menghimpun kembali kekuatan dalam masyarakat untuk melancarkan gerakan baru. Kelahiran Sarekat Islam merupakan peristiwa yang luar biasa dan tidak ada duanya karena mendahului gerakan kebangsaan sementara dari segi Islam, ia mendahului reformasi keagamaan.

Tjokroaminoto bergerak di “bawah perlindungan” pemerintah Hindia Belanda untuk menggerakkan perjuangannya. Ia memilih bersikap kooperatif guna membesarkan SI. Bersama Douwes Adolf Rinkes, penasihat Gubernur Jenderal Belanda untuk urusan pribumi, ia membangun cabang-cabang sarekat. Empat tahun setelah didirikan, perserikatan itu memiliki lebih dari 180 cabang dengan 700 ribu anggota, dua puluh kali lipat jumlah awalnya (Setyarso, 2011: 3).

SI menarik bagi masyarakat bawah karena dianggap adanya rasa kebersamaan sosial yang ditekankan dalam tubuh SI. Pada saat itu SI menjadi organisasi yang memiliki pengaruh dan sangat diperhitungkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kuntowijoyo (2008: 135) menjelaskan bahwa SI merupakan gerakan yang sudah ditunggu-tunggu untuk sebuah perubahan, bersama-sama dengan gerakan santri lainnya SI merespon perubahan yang disebabkan Pemerintah Hindia Belanda yang menyengsarakan masyarakat pada waktu itu. Kuntowijoyo menjelaskan lebih lanjut:

Dari laporan tahun 1917, kita mengetahui bahwa rakyat kecil di kota dan masyarakat rendahan pada umumnya menjadi anggota SI, yaitu orang-orang seperti mandor toko Jepang di Surabaya, buruh batik di Surakarta, tukang kopi di Surakarta, dan banyak lagi lainnya. SI kemudian menjadi organisasi massa. Hanya di beberapa tempat saja pengurusnya terdiri dari beberapa pedagang seperti yang ada di Jatinegara, di tempat lain SI mencakup semua kelompok pencari nafkah di masyarakat setempat, termasuk para priyayi dan petani. Di Madura dan Surakarta, bahkan serdadu pribumi adalah anggota organisasi SI. Ada juga guru, kasir bank, sekretaris dan juru tulis. Belum pernah

sebelumnya dan takkan terjadi lagi, suatu organisasi sosial Indonesia mampu menggalang begitu banyak golongan dalam masyarakat.

Budi Setyarso dkk. (2011: 3-4) menjelaskan SI berbeda dengan Budi Utomo yang lebih dahulu lahir pada 1908 namun bersifat elitis, SI memberi semangat “kebangsaan” bagi masyarakat luas. Kaum kromo-rakyat –jelata mengalami pengalaman pertama untuk melihat dunia baru, ketika hierarki Jawa-Belanda ditiadakan. Pemimpin-pemimpin sarekat duduk sejajar dengan pejabat Belanda, sambil menyerukan bahwa kaum pribumi sama-sama manusia seperti orang Belanda. Pada waktu itu muncul istilah yang menyebutkan kaum pribumi sebagai “seperempat manusia”.

Dalam kerangka stratifikasi masyarakat kolonial maupun tradisional, SI sering dianggap sebagai organisasi *wong cilik*. Para pedagang dan golongan menengah di dalamnya sering bertindak sebagai pemrakarsa, pengurus, atau penyedia dana. Latar belakang SI yang banyak didominasi masyarakat menengah ke bawah membuat SI semakin progresif dalam perlawanan. Tjokroaminoto menjadi tokoh sentral pergerakan, namanya menjadi semakin terkenal setelah dia sukses menyelenggarakan kongres SDI pertama di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913. Kongres itu merupakan salah satu keputusan yang sangat penting, karena dalam kongres itu nama Sarekat Dagang Islam (SDI) berubah menjadi Sarekat Islam (SI), dan mengubah konsep pergerakan yang berorientasi sosial-politik (Kuntowijoyo, 2008: 145).

Takashi Shiraishi (2011: 140) mengungkapkan SI merupakan pergerakan yang menjadi penanda munculnya politik kontemporer di Hindia Belanda. Politik gaya baru ini membawa cara-cara baru untuk mengekspresikan rasa kesadaran berbangsa mereka, yakni lewat penerbitan surat kabar, unjuk rasa, pemogokan, serikat buruh, dan partai politik. Tjokroaminoto sangat mumpuni dalam cara-cara baru ini.

D. Demokrasi dan Nasionalisme sebagai Langkah Perjuangan Politik Tjokroaminoto

Anhar Gongong (2011: 128-129) mengungkapkan Tjokroaminoto adalah pemimpin pertama yang secara terbuka menyatakan landasan pengaturan kehidupan bersama jika warga negara jajahan mendapatkan kesempatan menentukan nasib sendiri. Tjokroaminoto melalui SI “meminta” pemerintah Hindia Belanda membuka peluang penduduk pribumi berpemerintahan sendiri. Dalam sambutannya pada pembukaan kongres pertama Central Sarekat Islam pada 1916 di Bandung, ia menyatakan, seandainya dikabulkan oleh Ratu Belanda sistem pemerintahan yang akan dijalankan berdasar sistem demokrasi. Demokrasi sesuai dengan ajaran Islam, dalam perkembangannya kemudian tampak pada semua organisasi dan pemimpin pergerakan “sepakat” menempatkan demokrasi sebagai landasan pengaturan hidup bersama. Tjokroaminoto memang seorang demokrat, termasuk dalam memimpin partainya.

Demokrasi walaupun konsepnya lahir di Barat, namun menurut Tjokroaminoto konsep tersebut adalah suatu sistem ideal untuk dijadikan sebagai sistem pemerintahan. Demokrasi menurut Tjokroaminoto (1931: 22-23):

Walaupun pembuat undang-undang seluruhnya berada di dalam kekuasaan rakyat, hal ini tidaklah ada bahaya di dalam Islam, karena undang-undang buatan parlemen dengan referendum atau tidak, ataupun undang-undang yang seluruhnya dibuat oleh rakyat sendiri, semua itu (dalam Dinul Islam) tidak lain kecuali untuk menjabarkan atau melaksanakan asas-asas yang telah ditentukan dalam Alquran dan Alhadis. Semuanya dimaksudkan untuk mendidik dan mengajar rakyat menjalankan asas-asas demokrasi Islam.

Keberpihakan Tjokroaminoto dengan konsep demokrasi dapat terlihat dengan keberadaan parlemen. Parlemen menurut Tjokroaminoto merupakan perwujudan dari suara rakyat. Cita-cita demokrasi yang diusulkan oleh Tjokroaminoto sebetulnya merupakan respon dari kondisi masyarakat Hindia Belanda. Pada kurun waktu tersebut masyarakat bumiputra yang jumlahnya mayoritas ternyata tidak mampu untuk mengurus masalahnya sendiri karena tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Tjokroaminoto adalah orang pertama yang memikirkan tentang demokrasi sebagai sebuah sistem yang akan digunakan karena sistem ini tidak bertentangan dengan Islam.

Tjokroaminoto memiliki pandangan bahwa Islam dan ideologi Barat lainnya selain demokrasi yaitu nasionalisme, tidak terdapat pertentangan yang serius. Djoko Marihandono, dkk. (2015: 132-133) menyebutkan Tjokroaminoto menegaskan tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme, bahkan Islam dapat menjadi landasan nasionalisme. Namun, semagnetik zaman ketika itu berbalut pengaruh Pan-Islamisme dan Khalifahisme (*Khilafatisme*), yang membayangkan suatu komunitas Islam Internasional yang bebas dan mandiri. Namun perubahan zaman pula yang memainkan peranan dalam perjalanan pemikiran dan faham Islam di berbagai kawasan, terutama yang berada di bawah belenggu penjajahan Barat.

Arskal Salim (2008: 52) mengungkapkan bagaimana Tjokroaminoto meyakinkan pengikutnya bahwa nasionalisme Islam dan nasionalisme Barat tidak saling bertentangan:

Tjokroaminoto menyatakan bahwa Islam berisikan ajaran yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk politik, masyarakat, dan ekonomi. Oleh karena itu, tidaklah masuk akal untuk mengubah konsep nasionalisme Islam dengan memperkenalkan ungkapan lainnya. Nasionalisme membantu bangsa Indonesia menghindari perpecahan ke dalam jumlah besar nasionalisme kelompok etnik yang kecil. Jadi baginya nasionalisme Islam menyatukan bangsa Indonesia, tidak memandang latar belakang budaya etnik yang beragam.

Nasionalisme dan Islam dalam perspektif Tjokroaminoto tidak ada pertentangan. Nasionalisme justru menjadi jalan untuk menyatukan bangsa Indonesia (dalam konteks pada saat itu adalah Hindia Belanda) yang masih di bawah penjajahan Kerajaan Belanda. Tjokroaminoto

menempatkan nasionalisme dan Islam dalam sebuah alternatif dalam upaya mempersatukan masyarakat. Tjokroaminoto tidak mencari-cari perbedaan dan perbandingan dalam nasionalisme pada ajaran-ajaran Islam.

Holk H. Dengel (2011: 14-15) memaparkan dalam terbitan *Fadjar Asia* Tjokroaminoto mengungkapkan;

“Islam itoelah tjita-tjita kita jang tertinggi, sedang nasionalisme dan patriotisme itu ialah tanda-tanda hidoep jang kita sanggoep akan melakoekan Islam dengan seloeas-loeas dan sepenoeh-penoehnja. Pertama kita adalah moeslim, dan di dalam kemoesliman itoe adalah kita nationalist dan patriot, jang menoe djoe kemerdekaan negeri toempah darah kita”

Sayyidah Mawani (2017: 184) menegaskan dalam diri Tjokroaminoto akan terlihat pembentukan diri seorang warga negara yang nasionalis. Bahkan pada masa penjajahan sebelum Indonesia belum benar-benar terbentuk, Tjokroaminoto sudah dapat merasakan semangat nasionalisme dalam dirinya. Bagi Tjokroaminoto, keadaan masyarakat yang saat itu senasib sepenanggungan membuatnya memahami pentingnya pendirian sebuah republik untuk mampu mengangkat harkat martabat masyarakatnya.

Pemikiran nasionalisme Tjokroaminoto menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan secara menyeluruh dalam satu ikatan Islam untuk mengusir penjajahan. Dengan nasionalisme dapat memulihkan derajat dan martabat bangsa sebagai bangsa yang merdeka dan terhormat. Pemikirannya dalam nasionalisme mengikat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Islam, hal ini sangat beralasan karena latar belakang sosio historis masyarakat bumiputra beragama Islam.

Nasionalisme yang dibangun oleh Tjokroaminoto pada masa itu adalah nasionalisme yang berdasarkan pada semangat sosialisme dan Islam. Nasionalisme tersebut bersandar pada nilai-nilai kesetaraan, persamaan, serta kesejahteraan bersama. Nasionalisme sendiri akan membantu manusia-manusia di Indonesia untuk lebih mementingkan sesama. Sebab, jika perasaan nasionalisme tersebut telah tumbuh dan berkembang secara baik dalam setiap perilaku dan perbuatan manusia, maka manusia itu akan mencintai tanah airnya. Oleh karena itu, Tjokroaminoto menyebut nasionalisme dan sosialisme sebagai dua aliran yang dapat hidup berdampingan dan memberikan pengaruh antara satu dengan yang lain (Mawani, 2017: 185).

Terjadinya perpecahan pada SI membuat Tjokroaminoto harus menentukan sikapnya. Sebagai seorang demokrat, ia memilih jalan dialog dan berusaha sekuat tenaga menghindari perpecahan dalam pergerakannya. Ia menjadi wakil dua aliran dengan menggagas “Sosialisme Islam”. Gagasan tersebut dituangkan dalam buku *Islam dan Sosialisme* tahun 1924. Salah satu

tujuan buku tersebut adalah memberi pemahaman bahwa dalam Islam terkandung pula ajaran yang berkaitan dengan makna sosialisme itu. Anhar Gonggong (2011: 130) Tjokroaminoto dalam bukunya menerangkan;

Cita-cita sosialisme dalam Islam tidak kurang dari tiga belas abad umurnya dan bukan berasal dari pengaruh Eropa. Ketika itu tidak ada propaganda sosialisme yang teratur seperti sekarang ini. Asas-asas sosialisme telah dikenal pada masyarakat zaman Nabi Muhammad.

Tjokroaminoto tidak mengimani Marxisme, tetapi tidak menolaknya. Kata Hamka, Tjokroaminoto tidak mencela Marx dan Engels, bahkan berterima kasih kepada keduanya. Teori materialisme historis, kata Hamka mengutip Tjokroaminoto, “telah menambah jelasnya bagaimana kesatuan sosialisme yang dibawa Nabi Muhammad.” Propaganda Tjokroaminoto yang banyak mengutip dalil Marx lebih dari sekedar tindakan reaktif atas sikap kaum kiri terhadapnya (Triyana, 2011: 137).

Pemikiran politik tentang Sosialisme Islam yang dikemukakan oleh Tjokroaminoto tampaknya dibangun melalui asumsi yang berbeda. Tjokroaminoto tidak melihat Sosialisme Islam sebagai penggabungan antara dua pemikiran yaitu ajaran sosialisme yang berasal dari Barat dan ajaran Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Tjokroaminoto dalam *Islam dan Sosialisme*, cita-cita sosialisme di dalam Islam telah berkembang selama tiga belas abad dan tidak dapat dikatakan muncul dari pengaruh bangsa Eropa (Tjokroaminoto, 1966: 22).

Dari sekian banyak artikel yang pernah ditulis Tjokroaminoto, ada dua judul yang mencuri perhatian yaitu “Apakah Sosialisme Itu” dan “Sosialisme Berdasar Islam”. Dua tulisan ini dimuat dalam surat kabar SI, *Oetoesan Hindia*. Tjokroaminoto tidak pernah alergi dengan sosialisme yang memang sedang bersemi di Hindia Belanda pada awal abad ke XX itu. Ia bahkan dengan serius mempelajari sosialisme, kendati turunan dari paham inilah yang akhirnya membelah organ dalam SI. Bagi Tjokroaminoto, Islam dan sosialisme bukanlah dua kutub yang berseberangan dan menjadi pertentangan. Justru sebaliknya, keduanya saling melengkapi dan menghasilkan perpaduan sangat apik.

Pada masa kepemimpinan Rasullullah Muhhamad Saw asas-asas sosialisme telah diimplementasikan lebih banyak dan lebih mudah dibandingkan dengan sosialisme yang dikenal dalam pemikiran Barat. Sosialisme Islam yang dikemukakan oleh Tjokroaminoto diyakini olehnya tidak bersumber dan dipengaruhi oleh pemikiran politik yang berasal dari Barat, melainkan merupakan pemikiran yang terkandung dalam ajaran Islam.

Pemikiran yang serupa dengan ajaran sosialisme yang dikembangkan oleh Islam antara lain juga dikemukakan oleh Hassan Hanafi dengan istilah Kiri Islam (*The Islamic Left*). Kiri Islam

dapat difahami melalui pengertian yang diungkapkan oleh A.G Salih yang menyatakan bahwa “dalam Islam, *Kiri* memperjuangkan pemusnahan penindasan bagi orang-orang miskin dan tertindas, ia juga memperjuangkan persamaan hak dan kewajiban di antara seluruh masyarakat. *Kiri* merupakan kelompok yang memiliki kecenderungan sosialistik dalam Islam” (Shimogaki, 1993: 6).

Sebagaimana diungkapkan oleh Hassan Hanafi, *Kiri Islam* ditopang oleh tiga pilar untuk mewujudkan kebangkitan Islam. Pilar pertama adalah revitalisasi terhadap khazanah Islam klasik melalui rasionalisme demi kemajuan, kesejahteraan, dan upaya memecahkan situasi kekinian dalam dunia Islam. Pilar kedua adalah penentangan terhadap peradaban Barat, terkait dengan bahaya imperialisme kultural Barat yang cenderung membasmi kebudayaan bangsa-bangsa yang secara kesejarahan kaya. Pilar ketiga adalah analisis terhadap realita dunia Islam.

Tjokroaminoto dalam pembahasan tentang Sosialisme Islam secara spesifik menyebut bahwa sosialisme yang dimaksudnya adalah sosialisme yang bersandar kepada agama (Islam) yang wajib dilakukan oleh umatnya sepanjang hal tersebut merupakan perintah agama Islam. Sosialisme sebagaimana dimaksud adalah sosialisme yang telah berkembang kurang lebih selama tiga belas abad serta telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Muhammad Saw dan bukanlah sosialisme yang lahir dari pengaruh bangsa Eropa. Sosialisme Islam adalah pergerakan sosialisme yang dikontrol oleh identitas keislaman untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia maupun akherat (Nasihin, 2012: 150).

Pandangan Tjokroaminoto dengan demikian menunjukkan bahwa Sosialisme Islam bukanlah sosialisme yang lahir atau mendapatkan pengaruh dari sosialisme Barat, namun sosialisme yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Praktik Sosialisme Islam tersebut juga telah berkembang jauh sebelum sosialisme Barat berkembang di masyarakat Eropa pada abad ke XIX, karena Sosialisme Islam telah diterapkan sejak periode kepemimpinan Rasulullah Saw. Terdapat dua macam sosialisme yang dikenal oleh Islam, yaitu: (a) Staats-sosialisme, baik yang bekerja dengan kekuatan satu pusat (*gecentraliseerd*) maupun yang bekerja dengan kekuatan *gemeente-gemeente* (*gedecentraliseerd*). (b) Industri-sosialisme. Jika satu negeri bersifat sosialis, maka pekerjaan kerajinan (pabrik, industri) harus diatur seluas-luasnya secara sosialis (*gesocialiseerd*) juga.

Maka di dalam negeri yang demikian itu, keberadaan tanah menjadi pokok segala hasil dan pokok semua pekerjaan industri besar. Kalau hendak dijalankan seluas-luasnya *land-socialisme* dan *staat-socialisme*, maka bentuk sosialisme ini lah yang terutama sekali dijalankan oleh Islam. Sejak Nabi Muhammad Saw memegang kekuasaan negara, maka negara itu segera diaturnya secara sosialis, dan semua tanah dijadikannya sebagai milik negara (Tjokroaminoto, 1966: 22).

Berdasarkan model sosialisme tersebut di atas, maka negara baik di tingkat pusat maupun daerah memegang peranan penting dalam praktik sosialisme. Salah satu tugas dari negara adalah penguasaan terhadap tanah sehingga tidak dikenal kepemilikan pribadi. Tanah menjadi milik negara agar dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, alat-alat produksi yang dapat menghasilkan barang diberikan negara kepada rakyat. Tanah dimanfaatkan untuk memberikan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya pekerjaan kepada kaum pekerjaan (Tjokroaminoto, 1996: 23). Sosialisme Islam telah disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat Hindia Belanda

E. Pemikiran Tjokroaminoto dalam Bidang Pendidikan

Pemikiran Tjokroaminoto dalam pendidikan banyak dipengaruhi oleh sistem dan konsep pendidikan di masa Pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda tidak memberikan akses pendidikan pada seluruh masyarakat Hindia Belanda. Dalam sistem pendidikannya sekolah-sekolah Pemerintah Hindia Belanda tidak ada yang mengajarkan agama, dalam hal ini agama Islam (Wijiyanto, 2019: 102-103). Kondisi inilah yang membuat Tjokroaminoto menyoroti permasalahan pendidikan pada masa Hindia Belanda.

Sayyidah Mawani (2017: 169) menjelaskan dalam perjalanan hidupnya Tjokroaminoto sangat dekat dengan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam. Islam dipeluknya sebagai pedoman utama dalam berucap dan bertindak. Hal ini juga diajarkannya kepada anak didik serta para pengikutnya. Tjokroaminoto sangat menekankan bahwa hanya Islam yang dapat membawa kebahagiaan bagi seluruh umat. Untuk dapat menjadi seorang muslim seutuhnya, maka harus melewati proses pendidikan yang bernaung nilai-nilai Islam. Tahun 1930-an telah banyak berdiri sekolah yang dibangun cabang PSII di berbagai wilayah (Setyarso, 2011: 28). Sistem pendidikan di sekolah tersebut mengacu pada karya Tjokroaminoto yang berjudul *Moeslim Nationale Onderwijs*, atau dapat diartikan sebagai pengajaran nasional yang bersifat Islam.

Konsep pendidikan Tjokroaminoto lebih kedalam konsep dan ide sebagai alat untuk pergerakan belum kepada sistem operasional (wawancara dengan Sayyidah Mawani pada tanggal 30 Desember 2019). Konsep Tjokroaminoto yang tertuang dalam *Moeslim Nationale Onderwijs* menjelaskan bahwa asas-asas Islam merupakan asas-asas yang menuju demokratis dan sosialis (sosialis sejati yang berdasarkan Islam). Lebih lanjut dijelaskan bahwa selain mengajarkan kepandaian akal, haruslah juga; (1) menanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi; (2)

menanamkan benih keberanian yang luhur, benih keikhlasan hati, kesetiaan, dan kecintaan kepada yang benar; (3) menanamkan benih peri kebatinan yang halus, benih keutamaan budi, dan kebaikan perangai; (4) menanamkan benih kehidupan yang salih dan sederhana (Amelz, 1952: 166-167).

Budi Steyarso (2011: 28) mengungkapkan sekolah-sekolah tersebut mengajarkan persoalan dan arti sebuah kemerdekaan, budi pekerti, berbagai ilmu umum, dan tentunya ilmu agama Islam. Bagi Tjokroaminoto, asas-asas dalam agama Islam sejalan dengan semangat serta cita-cita sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme. Oleh karena itu, kaum muslim harus menerima pendidikan yang sesuai dengan takaran pendidikan dalam agama Islam, sehingga menjadi muslim yang sejati untuk mencapai kemerdekaan masyarakat di kemudian hari. Baginya, pengajaran adalah sesuatu proses penurunan ilmu melalui sikap, perkataan, dan perilakunya. Karena sebaik-baiknya pengajaran dan pendidikan adalah contoh nyata.

Sebagai seorang pemikir dan pergerakan yang berdasarkan Alquran dan Alhadis, maka Tjokroaminoto tentu tak lepas dari keduanya (Alquran-Alhadis). Sistem pendidikan yang telah dikonsepsikan oleh Tjokroaminoto (1965: 85-86) adalah: (1) Dengan sekuat tenaganya mendirikan sekolahnya sendiri yang cukup luas pengajarannya dalam ilmu duniawi dan ilmu agama, dengan mementingkan perasaan kebangsaan, terlebih lagi mencintai negeri, dan mengadakan rupa-rupa organisasi untuk memberi pendidikan berdasar Islam kepada anak-anak dan pemuda, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. (2) Melawan segala adat dan cara pendidikan yang sifat dan nafsunya akan merendahkan derajat kemanusiaan.

Tampak jelas bahwa Tjokroaminoto sangat menghendaki bagi pendidikan di negeri ini dapat dirasakan dengan menghasilkan keluasan intelektualitas dan religiusitas para siswannya. Tertuang dalam Kongres di Yogyakarta, 21-27 Agustus 1925 dalam kongres ini Tjokroaminoto menulis panjang lebar tentang konsep *Moeslim National Onderwijs*, yang memberikan warnanya di masa itu dengan menghendaki berdiri sebanyak-banyaknya sekolah kaum rakyat (bukan sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda). Isi konsep dari *Moeslim National Onderwijs* berbunyi:

Dimana asas Islam itu adalah asas yang menuju demokrasi dan sosialisme (sosialisme sejati yang berdasar Islam), dan asas itu juga memiliki tujuan untuk mencapai keinginan kemerdekaan umat dan kemerdekaan negeri tumpah darah, maka kalau kita kaum Muslimin mendirikan sekolah kita sendiri, tidak boleh tidak pengadjaran yang diberikan di dalamnya haruslah pengadjaran yang mengandung pendidikan akan menjadikan Muslim yang sedjati dan bersifat national dalam arti kata: menuju maksud akan mencapai cita-cita kemerdekaan umat (Amelz, 1952: 166).

Pendidikan menurut Tjokroaminoto bukan hanya sekedar suatu proses pengajaran secara formal yang dilakukan di sekolah. Pendidikan merupakan tentang berbagi dan menyalurkan

berbagai kemampuan yang kita miliki kepada orang lain, dengan tujuan untuk mendapat ilmu baru. Jadi, pendidikan bukan merupakan suatu proses yang bersifat satu arah, melainkan suatu proses timbal balik. Seorang guru dalam kegiatan pembelajaran dapat memperoleh ilmu serta pengalaman-pengalaman baru setiap harinya (Mawani, 2017: 181).

Tjokroaminoto dengan mudah menyederhanakan proses pendidikan itu sendiri. Baginya tidak butuh ruang kelas, seragam sekolah, maupun fasilitas penunjang lainnya. Satu hal yang dibutuhkan untuk dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran adalah kemauan dalam diri setiap orang (Mawani, 2017: 182). Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan setiap tahunnya. Tjokroaminoto selalu membuat diskusi-diskusi kecil yang dilakukannya dengan murid-muridnya sebagai sebuah kelas kecil, yang di dalamnya terdapat pengajaran, baik itu pelajaran umum maupun pendidikan karakter yang menempa murid-muridnya menjadi manusia yang teguh dengan tujuan membela dan memerdekakan bangsa pribumi.

Hasil dari pembelajaran kecil tersebut dapat dilihat pada diri murid-murid Tjokroaminoto, seperti Soekarno dan yang lainnya (Pradana, 2014: 193-194). Meskipun pada akhirnya murid-muridnya mengalami pertentangan antara satu dengan yang lain, namun pada intinya Tjokroaminoto telah mampu mendidik mereka menjadi tokoh besar dengan masing-masing ideologi yang dipegangnya. Tjokroaminoto, pada zaman yang serba sulit saat itu memberikan gambaran sejati pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukan hanya tentang rutinitas dan kegiatan di sekolah saja, buka pikiran, buka hati, dan tanamkan kemauan dan setiap individu akan memahami pendidikan.

Lebih lanjut dipaparkan pula dalam teori pendidikannya ini, bahwa sekolah kita hendaklah menjadi tempat berinteraksi atau tempat percampuran agama kita dan ilmu pengetahuan modern, sebagaimana yang dikehendaki Nabi Muhammad Saw dan dasar ilmu pengetahuan ialah memberi pengajaran untuk mengerti kepada Alquran dengan secukup-cukupnya (Amelz, 1952: 169-171). Diantaranya yaitu:

- a) Langkah pertama (*Lager Onderwijs*); yakni pengajaran yang ditempuh dalam jangka waktu 5, 6 atau 7 tahun.
- b) Langkah kedua (*Middelbaar Onderwijs*); yakni pengajaran yang ditempuh dalam waktu 4 atau 5 tahun.
- c) Langkah universiteit (*Hooger Onderwijs*); yakni pengajaran bagi para pemuda yang kurang lebih usia 20 atau 21 tahun.

Perbedaan dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda adalah pada pengajaran Alquran dan Alhadis. Bagi setiap anak didik yang belajar di sekolah-sekolah yang didirikan

Tjokroaminoto memuat pendidikan keagamaan, yaitu agama Islam. Pada sekolah milik Belanda tidak mengajarkan keagamaan. Hal ini pula yang kiranya pada arus globalisasi saat ini memiliki manifesto (aset keilmuan) yang diterapkan pada sekolah-sekolah negeri maupun swasta dengan mengajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan agama.

Sesuai dengan nilai-nilai karakter, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan memberikan pengaruh positif bagi mentalitas anak dalam pendidikan keluarga. Pendidikan Islam yang diajarkan Tjokroaminoto tampak dapat diserap dengan baik oleh anak-anak kosnya dan tertanam dalam pemikiran serta mempengaruhi tindakan anak-anak tersebut. Pemahaman mengenai Islam turut mewarnai pemikiran dan tindakan anak-anak kos Tjokroaminoto yang kemudian juga memberikan warna pada aktivitas dalam organisasi maupun tulisan di berbagai penerbitan dan pidato. Pengajaran Islam oleh Tjokroaminoto berserta diskusi yang dilakukan bersama tokoh-tokoh Islam, turut memberikan pengaruh dalam diri Soekarno. Kecenderungan Soekarno untuk lebih dekat dengan Islam merupakan sebuah konsekuensi logis dari pendidikan yang didapatkannya (Salam, 1982: 158-164).

Tjokroaminoto memang memilih jalan dialog dan memberikan ruang bagi tampilnya sejumlah individu yang beragam latar belakang, sehingga terjadi komunikasi pada berbagai kesempatan dan tempat. Tjokroaminoto memberikan pelajaran baik pada anaknya dan anak kosnya tentang arti kemerdekaan dan demokrasi yakni membela kebenaran dan berpihak pada rakyat serta hanya takut pada Allah. Tjokroaminoto mengajarkan ilmu pergerakan modern pada Alimin, Moeso, Soekarno, dan Kartosuwirjo (Setyarso, 2011: 28).

Tjokroaminoto menginginkan pendidikan yang berbasis Islam dapat membentuk manusia-manusia dengan pemikiran terbuka dan cerdas, serta manusia-manusia yang memiliki budi pekerti yang terpuji sesuai dengan ajaran Islam. Bagi Tjokroaminoto, pendidikan formal biasa hanya dapat menghasilkan manusia-manusia yang terpelajar tanpa memiliki landasan agama serta karakter yang baik. Hal ini akan membuat tujuan pendidikan tersebut cacat. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya yang sangat melimpah perlu menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan adat istiadat yang telah ada sebelumnya.

Pendidikan berbasis Islam yang diungkapkan oleh Tjokroaminoto masih sangat relevan apabila diterapkan dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini. Tjokroaminoto dalam rumusan konsep pendidikan nasional yang berbasis Islam selalu menekankan bahwa pendidikan di bawah naungan agama Islam penting adanya. Sayyidah Mawani (2017: 188) menjelaskan:

Dalam agama Islam terdapat berbagai ajaran mengenai moral dan pembentukan karakter yang berguna bagi manusia-manusia di Indonesia. Intinya adalah agama Islam mampu

memberikan asupan ilmu ke dalam jiwa-jiwa setiap manusia di Indonesia, yang kemudian akan terus dibawa hingga akhir hayatnya. Pendidikan dengan pendekatan karakter lebih mengedepankan keunggulan jiwa dan kecerdasan emosional seorang manusia, tanpa sedikitpun mengurangi kecerdasan akal manusia itu sendiri.

Agama dan budaya mampu menjadi sumber pengetahuan sekaligus sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang baik akan menghasilkan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Manusia tersebut tidak menjadi manusia yang egois dalam bertindak sehingga tindakannya ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Tanpa hal itu, manusia hanya menjadi mesin yang pintar tanpa perasaan dan jiwa. Pada intinya pendidikan karakterlah yang perlu diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Konsep pendidikan nasional yang diharapkan Tjokroaminoto adalah mendidik generasi bangsa agar mempunyai rasa cinta tanah air dengan dilandasi dengan nilai-nilai agama. Adapun implikasi dari pendidikan nasional adalah perlawanan dari perlawanan pada penjajah, wujud konkretnya nasionalisme adalah perlawanan pada penjajah. Tujuan pendidikan H.O.S Tjokroaminoto tidak ada dikotomi dalam ilmu tetapi juga harus dalam pendidikan harus ada rasa kebangsaan yang tinggi. Dengan adanya rasa kebangsaan yang tinggi tujuannya agar setiap umat dapat mengembangkan sebuah lembaga informal maupun formal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan harus menjalankan prinsip-prinsip dalam *Moeslim Nationale Onderwijs*.

Pendidikan dalam konsep landasan pendidikan nasional Tjokroaminoto memiliki hal penting yaitu pentingnya menanamkan paham demokrasi dan kesetaraan dalam suatu proses pendidikan (Mawani, 2017: 189). Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang cukup tinggi. Oleh karena itulah, keragaman serta perbedaan yang ada di Indonesia harus dapat disikapi dengan bijaksana (Parmono, 1993: 49-50). Pembelajaran mengenai proses demokrasi di sekolah-sekolah perlu diterapkan pada masa sekarang ini dengan tujuan setiap pelajar dan seluruh warga Indonesia memahami pentingnya demokrasi dan kesetaraan untuk ada dan hidup dalam tubuh bangsa Indonesia. Membentuk manusia Indonesia yang demokrasi adalah cita-cita Tjokroaminoto.

Sedangkan relevansi nasional Tjokroaminoto pada konteks sekarang adalah merupakan perlawanan dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Wujudnya nasionalisme saat ini adalah mengatasi masalah-masalah ekonomi, politik maupun pendidikan agar dapat lebih maju. Konsep pendidikan nasional menurut Tjokroaminoto mempunyai relevansi dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam akan maju dan memenuhi tuntutan zaman bilamana Islam dan khususnya pendidikan Islam dilihat sebagai sebuah sistem yang dinamis. Pemikiran Tjokroaminoto tentang pendidikan nasional dapat dikontekstualisasikan pada masa sekarang yakni mencintai bangsa dan negara dengan memajukan bangsa Indonesia dari segala bidang khususnya pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa pemikiran tentang nasionalisme sangat relevan dengan pendidikan Islam.

Simpulan

Tjokroaminoto tumbuh dalam lingkungan priyayi yang dekat dengan Islam. Tjokroaminoto menjadi sosok yang memiliki pendalaman agama yang baik karena pengaruh lingkungan keluarga yang religius. Tjokroaminoto bersekolah di sekolah bentukan Pemerintah Hindia Belanda yaitu OSVIA di Magelang, yang kemudian mengantarkannya untuk menjadi seorang *pangreh praja*. Tjokroaminoto lebih memilih untuk meninggalkan kemapanannya sebagai seorang priyayi sekaligus pegawai pemerintahan Belanda. Kondisi masyarakat pada waktu itu mendorongnya untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda.

Tjokroaminoto memilih untuk masuk dalam Sarekat Dagang Islam sebagai jalan perlawanannya terhadap penjajahan. Ia terpilih sebagai ketua SI dan membawa SI menjadi organisasi masa terbesar di Hindia Belanda dan memiliki pengaruh yang besar. Nilai-nilai Islam menjadi ruh dalam setiap perjuangan Tjokroaminoto baik dalam bidang politik maupun pendidikan. Tjokroaminoto mampu memadukan pemikiran Barat dan pemikiran Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu. Ia mampu memberikan bekal kepada para penerusnya dalam mewujudkan cita-citanya Indonesia yang merdeka.

Moeslim Nationale Onderwijs lahir sebagai konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Tjokroaminoto berdasarkan latar belakang kondisi pendidikan Hindia Belanda. Pendidikan dalam gagasan Tjokro harus menawarkan konsep pendidikan modern yang selaras dengan nilai pengetahuan yang berkembang. Nilai-nilai demokrasi, nasionalisme, sosialisme yang berkembang di Barat dianggap mampu memiliki relevansi dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

A.C Deenik, G. H. H. Zandvoort, R. Sadikin. 1929. *Gedenkboek: MOSVIA 1879-1929*. Bandoeng: N.V. Mij Vorkink.

Buku

Amelz. 1952. *H.O.S Tjokroaminoto hidup dan perjuangannya*. Jakarta: Bulan Bintang.

Dengel, H. H. (2011). *Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo "angan-angan yang gagal"*. Jakarta: Sinar Harapan.

Djumhur, I. dan Danasuparta. 1959. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu.

Gunawan, Ary H. 1986. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Gonggong, A. 1985. *H.O.S. Tjokroaminoto*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

_____. 1986. *HOS. Tjokroaminoto*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- _____. 2011. Tjokroaminoto: rumah ideologi dan dialog. Dalam B. Setyarso, dkk. (Eds), *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa* (pp. 126-132). Jakarta: KPG.
- Marihandono dkk., D. 2015. *H. O.S. Tjokroaminoto penyemai pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Mawani, S. 2017. *HOS Tjokroaminoto*. Yogyakarta: Sociality.
- _____. 2015. *Haji Oemar Said Tjokroaminoto*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Mulawarman, A. D. (2015). *Jang oetama: jejak dan perjuangan h.o.s Tjokroaminoto cet. 1*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Nagazumi, A. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka.
- Nasihin. 2012. *Sarekat Islam mencari ideologi 1924-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, S. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Niel, R.V. 2009. *Munculnya elit modern indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Noer. 1982. *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2008. *Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Rutgers, S.J. 2012. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Salim, A. 2007. *Haji Oemar Said Cokroaminoto cet 1*. Bandung: Nuansa.
- _____. 2008. *Challenging the secular state islamization of law in modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai Press.
- Santosa, K. O. (2009). *Manusia di panggung sejarah: pemikiran dan gerakan tokoh-tokoh Islam*. Bandung: Sega Asri.
- Setyarso, B. (2011). *Seri buku tempo Tjokroaminoto*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Shimogaki, K. 1993. *Kiri Islam antara modernisme dan postmodernisme, telaah kritis pemikiran Hassan Hanafi*. Yogyakarta: Lkis.
- Simbolon, Parakitri T. 2006. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sutherland, H. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 1973. *Pangreh Praja: Java's Indigenous Administrative Corps and Its Role in The Last Decades of Dutch Colonial Rule*. Michigan: Yale University.
- Sutidja, T. 2007. *H.O.S. Tjokroaminoto (1883-1934): yang gigih membela rakyat kecil cet. 3*. Bandung: PT. Rakasta Samasta.
- Tjokroaminoto, H. O. S. (1931). *Sedjarah pergerakan Indonesia 1929-1930: berisi pidato-pidato anggota-anggota Volksraad*. Wolterverden: Fonds National.
- _____. 1950. *Tarich agama Islam (riwayat dan pemandangan atas kehidupan dan perdjalanan Nabi Muhammad SAW)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1955. *Tarikh agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1965. *Tafsir program atas dan program tadhim*. Jakarta: Ladjnah Tanfidzyah PSII.
- _____. 1966. *Islam dan sosialisme*. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpunan Sedjarah Revolusi Indonesia.
- Triyana, B. 2011. Titian bercabang sang Herucokro. Dalam B. Setyarso, dkk. (Eds), *Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa* (pp. 133-138). Jakarta: KPG.

- Achdian, A. 2017. Sarekat islam sebagai kelanjutan boedi oetomo: H.O.S Tjokroaminoto dan awal kebangkitan nasional di kota Surabaya, 1908-192. *Jurnal Sejarah*, 1 (1). DOI: 10.26639/js.v1i1.51.
- Aziz, M. A. 2018. Islam, sosialisme dan politik prespektif pemikiran Tjokroaminoto. *Jurnal risalah pendidikan dan studi Islam*, 4 (2). DOI: 10.5281/zenodo. 1149676.
- Melayu, H. A. 2002. Islam as an ideology: the political thought of Tjokroaminoto. *Jurnal studi islamika*, 9 (1). DOI: 10.15408/sdi.v9i3.659.
- Parmono. (1993). Konsep nilai menurut Max Scheler. *Jurnal Filsafat UGM*, 16 (1). Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31366/18962>
- Wijiyanto, S. T. 2019. Tjokroaminoto: sosialisme Islam. *Bihari jurnal pendidikan sejarah dan ilmu sejarah*, 2 (1). Retrieved from <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/866>
- _____. (2019). Sekolah pendidikan menengah pangreh praja: MOSVIA Magelang 1927-1942. *Abad jurnal sejarah*, 3 (1).
- Yasmis. 2009. Sarikat Islam dalam pergerakan nasional (1912-1927). *Jurnal sejarah lontar*, 6 (1). Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/lontar/article/download/2505/1926/>